



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Eksistensi Desa di Indonesia

Al Ghazali Herdiyansah^{1*}, Mawar²

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, alherdiyansah@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia, mawar@umj.ac.id

*Corresponding Author: alherdiyansah@gmail.com

Abstract: *The government's budget efficiency policy has been the subject of much scrutiny because of its impact on the sustainability of village development. Previous studies on budget efficiency have not been discussed comprehensively, particularly in relation to its impact on the existence of villages. This study focuses on the question of how budget efficiency policies affect the existence of villages and the public sector at the local level. To answer this question, this study uses a qualitative descriptive approach and the Miles and Huberman analysis method, which focuses on data reduction, presentation, and verification. The findings of this study show that budget efficiency policies have had a number of negative impacts, including delays in community empowerment programs, obstacles to priority programs such as food security and stunting prevention, and budget cuts that have resulted in delays in the disbursement of village funds and salary cuts for village officials. This context shows that budget efficiency, which is intended to make state spending more effective, actually weakens the role of villages in sustainable development.*

Keywords: *Budget Efficiency, Village Existence, Public Policy*

Abstrak: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak sedikit menjadi sorotan karena berdampak pada keberlangsungan pembangunan desa. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai efisiensi anggaran belum dibahas secara komprehensif, khususnya terkait pengaruhnya terhadap eksistensi desa. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi eksistensi desa dan sektor publik di tingkat lokal. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode analisis Miles dan Huberman yang berfokus pada reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak sedikit menimbulkan dampak negatif, di antaranya penundaan program pemberdayaan masyarakat, penghambatan program prioritas seperti ketahanan pangan dan penanganan stunting, serta pemangkasan anggaran yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana desa dan pemotongan gaji perangkat. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran yang dimaksudkan untuk mengefektifkan pengeluaran negara justru melemahkan peran desa dalam pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Eksistensi Desa, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintahan di negara berkembang kerap menimbulkan dampak yang kompleks, terutama ketika kebijakan tersebut diterapkan tanpa perumusan yang matang (González Maestrey, 2022; Guo et al., 2021; Réka Juhász, 2024; Steiker & Jordan, 2019). Hal ini sering kali berujung pada berbagai bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun administratif, sebagai akibat dari implementasi kebijakan yang belum siap secara substansial (Baekgaard & Madsen, 2024; Cavalca et al., 2022; de Leeuw et al., 2022; Gooden, 2023; Kliuchnyk, 2022; Pattaro et al., 2020). Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, salah satu kebijakan Yang menjadi sorotan utama adalah upaya efisiensi anggaran, sebuah langkah strategis yang meskipun secara prinsip bertujuan untuk memperbaiki tata kelola fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, tetap tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan kajian kritis yang mendalam (Cavalca et al., 2022; Jahn & Suda, 2022; Vinturis, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan serupa menjadi sangat krusial dan tidak dapat diabaikan, mengingat pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Di Indonesia Kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo kini menjadi sorotan panas nasional, setelah menuai penolakan dari sejumlah tokoh pemerintahan dan memicu keresahan di tengah masyarakat. Namun, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penelitian yang mendiskusikan tentang dampak kebijakan hanya berfokus pada tiga konteks utama. Pertama, penelitian dampak kebijakan dalam konteks ekonomi (Esmaeilpour Moghadam & Karami, 2025; Henzie et al., 2020; Peiyan Yin , 2025; Wang et al., 2024; Zhao et al., 2024). Kedua, penelitian dampak kebijakan dalam konteks lingkungan (Gawusu et al., 2025; Lu & Zeng Wenling, 2025; Tao et al., 2025; Wu et al., 2024; Zhang et al., 2025). Ketiga, penelitian dampak kebijakan dalam konteks sosial (Brennan et al., 2025; Jov et al., 2025; Kirkley, 2025; Mahajan & Helbing, 2025; Saif et al., 2020). Penelitian dampak kebijakan banyak juga yang membahas tentang teknologi (Pahlevi & Andrini, 2025; Raza et al., 2025; Shahi & Chaudhary, 2025; Shikang Kang, 2025) dan transportasi (Orhan & Wallace, 2025; Teshome et al., 2024) infrastruktur (Laimon, 2025; Ni'cholas Johnson, 2025). Secara umum penelitian-penelitian dampak kebijakan terdiri dari beberapa konteks yang beragam, ekonomi, sosial, lingkungan, transportasi, dan infrastruktur.

Tabel 1. Realisasi Belanja Negara (APBN) 2021–2025

Tahun	Belanja Negara(Triliun Rp)	Keterangan
2021	2.786,8	Realisasi APBN di tengah pandemi COVID-19
2022	3.090,8	Peningkatan seiring pemulihan ekonomi
2023	3.212,9	APBN difokuskan pada stabilisasi ekonomi
2024	3.350,3	Belanja meningkat dengan fokus kesejahteraan sosial
2025	3.621,3	Pagu indikatif APBN pemerintahan baru

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2021-2025

Dari data tersebut terlihat bahwa selama periode 2021–2025, belanja negara meningkat sekitar 29,9 %, mencerminkan kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat program prioritas nasional. Namun, jika meninjau alokasi khusus untuk Dana Desa, terlihat bahwa porsi anggaran untuk sektor pedesaan relatif konstan dan belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Tabel 2. Realisasi Belanja Negara (APBN) 2021–2025

Tahun	Alokasi Dana Desa (Triliun Rp)	Catatan
2021	71,9	Realisasi awal pascapandemi
2022	67,9	Alokasi menurun karena efisiensi anggaran
2023	70,0	Kembali meningkat secara moderat
2024	71,0	Alokasi tetap stabil mendekati angka tahun 2021

Sumber: Kementerian Desa PDTT, 2024

Jika dibandingkan dengan total belanja negara, porsi Dana Desa hanya berkisar antara 2,2 % hingga 2,6 % dari total APBN tiap tahunnya. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rasio Dana Desa terhadap Belanja Negara

Tahun	Dana Desa (Triliun Rp)	Belanja Negara (Triliun Rp)	Rasio(%)
2021	71,9	2.786,8	2,58%
2022	67,9	3.090,8	2,20%
2023	70,0	3.212,9	2,24%

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Data ini menunjukkan bahwa meskipun nominal Dana Desa cenderung meningkat, proporsinya terhadap APBN masih relatif kecil, sehingga kemampuan fiskal desa untuk berperan optimal dalam pembangunan nasional menjadi terbatas. Kondisi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara belanja nasional dan belanja lokal yang berorientasi langsung pada masyarakat desa.

Dengan demikian, upaya efisiensi anggaran di tingkat pusat perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan di tingkat desa. Tanpa hal tersebut, kebijakan efisiensi berisiko memperlemah peran desa dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa penerapan kebijakan efisiensi fiskal yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal dapat menimbulkan efek berantai terhadap keberlanjutan pembangunan desa. Kebijakan yang semula bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas justru berisiko menciptakan ketimpangan baru, memperlemah kelembagaan lokal, serta menghambat peran desa sebagai pusat pembangunan berbasis masyarakat.

Dampak efisiensi anggaran sering diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, penerapannya tidak jarang menciptakan tekanan baru di sektor pelayanan publik dan sosial. Namun, sejauh ini penelitian-penelitian yang ada belum dilakukan secara komprehensif, terlebih lagi penelitian yang mendiskusikan mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam konteks media atau narasi kebijakan publik yang berkembang di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Mengingat penelitian mengenai bagaimana kebijakan efisiensi direpresentasikan serta berdampak secara sosial, kelembagaan, dan layanan publik masih terbatas. Maka penelitian ini, selain merespon kekosongan studi terdahulu, juga bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran berdampak melampaui aspek fiskal serta membentuk ketimpangan dalam tata kelola publik.

Di tengah tekanan untuk menyeimbangkan fiskal negara, kebijakan efisiensi anggaran kerap diambil sebagai solusi instan. Namun, kebijakan ini justru berisiko menciptakan dampak struktural yang tidak proporsional, terutama bagi desa-desa yang tengah berupaya memperkuat kapasitas pembangunan dan memperluas peran strategisnya dalam agenda nasional. Maka, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan studi yang ada, tetapi juga menganalisis

bagaimana kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap eksistensi dan kapasitas desa dalam menghadapi tantangan pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap eksistensi desa di Indonesia, (2) apa dampaknya terhadap sektor publik, Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi penghambat pembangunan desa, tetapi justru menjadi alat penguatan kelembagaan lokal. Dengan memahami dampaknya secara kritis, kebijakan efisiensi dapat diarahkan agar lebih adil dan kontekstual dalam kerangka pembangunan yang inklusif.

METODE

Penelitian ini dilakukan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Namun penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan efisiensi anggaran di desa. Sutikno et al., (2025) menjelaskan bahwa penelitian mengenai efisiensi dana desa memerlukan analisis yang mendalam untuk memahami pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah desa secara menyeluruh, sehingga menarik untuk menjelaskan lebih dalam terhadap kebijakan efisiensi dana desa. Searah dengan itu, penelitian ini juga berdasarkan pada Tiga pertimbangan utama. Pertama, penelitian dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap eksistensi desa belum banyak dilakukan dan diteliti secara komprehensif. Kedua, kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak yang sangat beragam terhadap tata kelola desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, isu ini sangat penting dan relevan karena kebijakan efisiensi telah menjadi prioritas nasional.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bersumber pada data utama, yaitu data sekunder. Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini melalui proses analisis beberapa artikel berita melalui media online google.com. Proses pencarian dan pembacaan artikel berita dilakukan pada tanggal 3 Maret sampai dengan 30 Juli 2025 menggunakan kata kunci pencarian “dampak kebijakan” dan “kebijakan efisiensi desa”. Cara pembacaan artikel berita juga difokuskan pada dua konteks. Pertama, artikel berita yang dibaca berfokus pada kategorisasi dampak kebijakan. Kedua, artikel berita yang dibaca berfokus pada dampak kebijakan efisiensi di desa. Dari hasil penelusuran diperoleh 4.300 artikel berita. Selanjutnya dilakukan penyaringan data berdasarkan kriteria pemilihan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berita yang dipilih secara langsung membahas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan menjelaskan dampaknya terhadap desa atau penyelenggaraan sektor publik di tingkat lokal. Melalui proses ini, diperoleh 10 artikel berita yang digunakan sebagai bahan analisis utama.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang pernah dilakukan oleh (Ndawo, 2021) menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang berfokus pada tiga tahap. Pertama yaitu mereduksi data. Pada tahap reduksi data, dilakukan penelaahan sistematis terhadap seluruh data untuk mengidentifikasi dan menyaring informasi yang relevan dengan dampak kebijakan efisiensi anggaran. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan hasil analisis ke dalam kategori tematik yang mencakup aspek ekonomi desa, infrastruktur dan pembangunan, pelayanan publik, serta administrasi dan kelembagaan desa. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menafsirkan pola temuan untuk menjelaskan dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam konteks kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Eksistensi Desa di Tengah Kebijakan Pemerintah

Kebijakan efisiensi anggaran desa sering diposisikan sebagai bentuk pemangkasan yang berdampak langsung terhadap eksistensi desa dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut Sutikno et al., (2025) juga mengatakan bahwa efisiensi anggaran desa di Indonesia

sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan pengelolaan dana desa. Dalam konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan Tabel 4.

Tabel 4. Kendala Efisiensi desa

Desa	Dampak Kebijakan	Link Berita
Jepang Pakis	Di desa Jepang pakis terjadi keterlambatan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat, sementara waktu terpaksa ditunda karena keterbatasan anggaran. Dirinya juga menyoroti besarnya anggaran yang belum dicairkan(Naufaldo, 2025).	https://joglojateng.com/2025/02/19/dana-desa-ditahan-ini-dampak-kebijakan-efisiensi-anggaran-pemerintah/
Blora	BPN Blora pada 2024 mampu menerbitkan SHAT sebanyak 13.096. Angka tersebut ditargetkan naik menjadi 18.808 SHAT untuk memenuhi kekurangan yang ada di Kabupaten Blora. Namun, adanya efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, belasan SHAT gagal diterbitkan (Ramadhana, 2025).	https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/715710346/terdampak-efisiensi-anggaran-pemerintah-pusat-kuota-pts-blora-dipangkas
Gunung Kidul	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DPMKP2KB) Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa alokasi dana insentif desa pada tahun ini turut mengalami dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, menurut pihak dinas, dana insentif tersebut memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program prioritas di tingkat desa, seperti pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), peningkatan ketahanan pangan, serta upaya penanggulangan stunting(Nanda Sagita Ginting, 2025).	https://jogja.tribunnews.com/2025/02/27/imbis-efisiensi-anggaran-dana-insentif-desa-di-gunungkidul-ikut-terdampak .
Luwu	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu, Ikhsan Asaad, menyatakan bahwa pada awalnya dana transfer untuk sektor pekerjaan umum dialokasikan dalam jumlah yang cukup besar. Namun, anggaran tersebut kemudian mengalami pengurangan hingga sebesar Rp97,4 miliar, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025(amran Amir, 2025).	https://regional.kompas.com/read/2025/02/17/104649578/efisiensi-anggaran-dana-untuk-infrastruktur-di-luwu-dipangkas-jadi-rp-0

Kapuas Hulu	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, Rupinus, menjelaskan bahwa alokasi dana desa pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar Rp3,4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan tersebut merupakan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap prioritas penggunaan dana yang tersedia(Timotius, 2025).	https://insidepontianak.com/pu-tussibau/35628/dampak-efisiensi-anggaran-dana-desa-kapuas-hulu-berkurang-rp34-miliar
-------------	--	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap eksistensi desa-desa di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4 yang menggambarkan tiga kecenderungan utama.

Pertama, dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap eksistensi desa di Indonesia menunjukkan kesulitan desa-desa dalam mengelola keuangan di pemerintahan saat ini. Hal ini dapat terlihat melalui Desa Jepang Pakis yang menjelaskan bahwa terbatasnya anggaran membuat pemerintah desa terpaksa menunda program pemberdayaan masyarakat. Dan dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran sangat menghambat pengelolaan desa berkelanjutan.

Kedua, kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak terhadap eksistensi desa di Indonesia yang menunjukkan bahwa desa-desa kesulitan dalam menerapkan program pemerintah seperti program penanganan *stunting* di desa. Hal ini dapat terlihat pada kasus desa Gunung Kidul yang menjelaskan bahwa dana insentif desa memiliki peran penting dalam mendukung berbagai pengembangan dan penguatan program prioritas desa, seperti infrastruktur, bantuan langsung tunai, ketahanan pangan, hingga penanganan *stunting*.

Ketiga, dampak kebijakan efisiensi anggaran juga dirasakan pada sektor pekerjaan umum dan pembangunan di desa, seperti yang terjadi di desa Luwu dan Kapuas Hulu. Dalam keterbatasan anggaran pemerintah desa mengalihkan sebagian dana pembangunan desa ke program-program prioritas lainnya. Akibatnya berbagai kegiatan yang pembangunan di desa terhambat, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum yang harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Melalui fenomena ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran desa dapat mengganggu jalannya pelayanan dasar dan pembangunan yang seharusnya dilakukan di tingkat desa.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak sedikit berdampak ekstrem terhadap eksistensi desa-desa di Indonesia. Hal ini terjadi karena desa-desa kesulitan menjalankan program Efisiensi yang bertujuan untuk mengefektifkan pengeluaran malah menimbulkan tantangan baru di tingkat desa, terutama tidak disesuaikan dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan dalam konteks lokal di desa.

Dampak Efisiensi Anggaran Desa terhadap Sektor Publik

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat secara luas telah membawa dampak yang serius terhadap keberlangsungan sektor publik, khususnya tingkat desa. Efisiensi ini berdampak langsung terhadap program penguatan ekonomi desa, infrastruktur, penggajian aparatur desa, dan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Dampak Efisiensi Anggaran Desa

Desa	Dampak Kebijakan	Sumber Berita
Ekonomi desa	Kementerian Pertanian mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp10,28 triliun dari total pagu awal Rp29,3 triliun, sementara anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) turut dikurangi sebesar Rp772 miliar dari total pagu Rp2,19 triliun. Pemotongan ini berdampak langsung pada pelaksanaan program penguatan ekonomi di tingkat desa, terutama yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akibat berkurangnya anggaran, banyak BUMDes terancam kehilangan dukungan berupa pendampingan dan pembinaan. Padahal, sejumlah desa telah menunjukkan kemajuan ekonomi dengan mengembangkan berbagai sektor, seperti pengolahan sampah, pemanfaatan minyak jelantah, hingga pengembangan desa wisata (Pristiandaru, 2025).	https://lestari.kompas.com/read/2025/02/18/110000886/pemangkasan-anggaran-pengaruhi-kesejahteraan-petani-dan-ekonomi-desa#google_vignette
Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp70,1 miliar. Akibat kebijakan efisiensi tersebut, sekitar 95 persen proyek pembangunan fisik yang sebelumnya telah direncanakan harus ditunda pelaksanaannya. “Akibat efisiensi anggaran secara serentak dari pemerintah pusat, Dinas PUPR Madina tidak lagi memperoleh DAK Rp3,1 miliar, dan DAU sebesar Rp67 miliar. Semua kegiatan dinolkan dari sumber anggaran tersebut pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan lainnya yang sudah final dibangun tahun 2025, menjadi tertunda. Bahkan, bangunan yang menjadi urgensi juga ditunda pembangunannya.” kata Elfi (Sibanggor, 2025).	https://tapsel.wahananews.co/serba-serbi/efisiensi-anggaran-dana-pusat-akan-berdampak-bagi-pembangunan-madina-A8f9yj1EV4
Perangkat Desa	Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifudin menuturkan, pihaknya termasuk OPD yang terdampak efisiensi anggaran tersebut. Banyak kegiatan lapangan dan seremonial yang direncanakan tahun ini. Pihaknya menyiasatinya dengan <i>Zoom</i> . ”Sangat terdampak, 50 persen DAU kami terpangkas. Total anggaran di kami Rp 201 miliar,” Pemangkasan DAU secara besar	https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/745619643/anggaran-dau-di-pamekasan-dipangkas-puluhan-miliar?page=2

	mempengaruhi kondisi ekonomi dalam perencanaan desa (Margaretta, 2025).	
Pemangkasan gaji	Dalam proses pembahasan ulang terhadap APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2025 yang telah disahkan, Badan Anggaran DPRD Kepahiang menegaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) akan mengalami pemotongan sebesar Rp3,4 miliar. Dampak dari pengurangan ini membuat pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembayaran bagi kepala desa, perangkat desa, serta tenaga keagamaan dan unsur pendukung lainnya (Relius, 2025).	https://rbtv.disway.id/read/83058/efisiensi-anggaran-add-kepahiang-dipastikan-dipangkas-rp-34-miliar
Keterlambatan Dana Desa	Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sinjai mengalami pemangkasan signifikan. Dari pagu awal Rp64.927.500.700, total ADD yang dipangkas mencapai Rp2.429.391.400. Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi, setiap desa di Kabupaten Sinjai harus memangkas anggaran sekitar Rp30 hingga Rp43 juta dari jumlah yang sebelumnya disepakati dalam Musyawarah Desa (MusDes). Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan dana desa. Penundaan penyaluran tersebut turut memengaruhi pelaksanaan berbagai program di tingkat desa, seperti distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), kegiatan Posyandu Stunting, hingga proyek pembangunan fisik. (redaksi desa, 2025).	https://desamerdeka.id/efisiensi-anggaran-add-desa-di-sinjai-dipangkas-penyaluran-dd-terhambat/

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Efisiensi anggaran sering kali dianggap sebagai Langkah tepat untuk menertibkan uang belanja negara. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tidak selalu berjalan ideal, terutama ketika diterapkan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di desa. Banyak kasus pemangkasan anggaran justru menyulitkan pemerintah desa dalam menjalankan program desa dan menimbulkan masalah baru. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2 serta kecenderungan yang terjadi di desa.

Efisiensi anggaran berdampak serius pada sektor ekonomi desa, pemotongan anggaran di Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa berdampak pada minimnya pendampingan terhadap BUMDes, Ketika pendamping desa hilang, banyak usaha desa menjadi stagnan dan tidak berkembang optimal. Padahal, keberadaan BUMDes menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal, seperti pengolahan sampah, dan pengembangan desa wisata.

Di sektor infrastruktur dan perencanaan Pembangunan, efisiensi menyebabkan terhambatnya hampir seluruh proyek fisik yang telah direncanakan. Ini dapat dilihat di Kabupaten Mandailing Natal, pemotongan DAK dan DAU sebesar 70,1 miliar mengakibatkan 95% program infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan irigasi tertunda atau dibatalkan. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pamekasan, pemangkasan DAU memaksa pemerintah desa dan OPD menyiasati program kerja dengan mengurangi kegiatan lapangan secara drastis

dan menggantinya dengan daring. Ini menunjukkan bahwa efisiensi sangat berdampak pada penurunan kualitas dan jangkauan layanan publik dasar.

Sementara itu, di sektor administrasi dan sosial desa, pemangkasan anggaran mengganggu kestabilan pemerintah dan distribusi layanan masyarakat. Di Kabupaten Kepahiang pemotongan ADD menyebabkan desa tidak mampu membayar gaji kepala desa dan perangkatnya. Sejalan dengan itu, di Kabupaten Sinjai pengurangan ADD memicu keterlambatan pencairan dana desa yang pada akhirnya menghambat program penting penyaluran BLT. Konteks ini menunjukkan efisiensi tidak hanya memengaruhi perencanaan, tetapi secara langsung memperlambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa efisiensi anggaran berdampak luas terhadap berbagai sektor publik di desa. Dari ekonomi, infrastruktur, hingga layanan sosial, semua mengalami penurunan fungsi akibat kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang tidak dirancang secara tepat justru memperlemah desa dalam menjalankan peran dasarnya sebagai penyedia layanan dan penggerak pembangunan lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berhenti pada urusan penghematan fiskal semata, tetapi berpengaruh langsung terhadap kehidupan dan keberlanjutan desa. Efisiensi anggaran membuat pemerintah desa memiliki ruang yang semakin terbatas untuk menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang terlihat dari tertundanya berbagai program penting seperti penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, dan penanganan stunting. Dalam kondisi ini, desa justru menghadapi tekanan baru karena harus tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan anggaran yang semakin menyempit. Di sisi lain, efisiensi anggaran juga berdampak pada kinerja sektor publik di tingkat desa, terutama melalui keterlambatan pencairan dana desa dan pemangkasan anggaran yang mengganggu pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta stabilitas pemerintahan desa, termasuk pemenuhan hak aparatur desa. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di desa cenderung melemahkan peran desa, sehingga efisiensi seharusnya dipahami sebagai upaya penataan anggaran yang lebih bijak dan kontekstual agar desa tetap mampu menjalankan fungsinya dalam pembangunan berkelanjutan.

Efisiensi yang dimaksudkan untuk mengefektifkan pengeluaran negara tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar dan program prioritas desa. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus dirumuskan secara mendalam agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di tingkat lokal dan juga menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas efisiensi pada skala nasional, bukan pada dampaknya di tingkat desa. Sejalan dengan itu, penelitian ini tidak hanya menunjukkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap desa, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang kebijakan publik yang lebih inklusif dan adaptif. Kontribusi ini di harapkan menjadi pedoman dalam merumuskan strategi efisiensi yang tetap mendukung pembangunan berkelanjutan di desa.

REFERENSI

- Amran Amir, I. (2025). *Efisiensi Anggaran, Dana untuk Infrastruktur di Luwu Dipangkas Jadi RP 0*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/17/104649578/efisiensi-anggaran-dana-untuk-infrastruktur-di-luwu-dipangkas-jadi-rp-0>.
- Baekgaard, M., & Madsen, J. K. (2024). Anticipated administrative burdens: How proximity to upcoming compulsory meetings affect welfare recipients' experiences of administrative burden. *Public Administration*, 102(2), 425–443. <https://doi.org/10.1111/padm.12928>.

- Brennan, C., Streight, E., Cheng, S., & Rhodes, R. E. (2025). *Parents' experiences of family-based physical activity interventions: a systematic review and qualitative evidence synthesis*. 1–21.
- Cavalca, P. G., Ejrnæs, M., & Gortz, M. (2022). Trading off fiscal budget adherence and child protection. *PLoS ONE*, 17(3 March), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261664>.
- de Leeuw, E., Yashadhana, A., & Hitch, D. (2022). Long COVID: sustained and multiplied disadvantage. *Medical Journal of Australia*, 216(5), 222–224. <https://doi.org/10.5694/mja2.51435>.
- Deng, J., Wang, S., Hou, H., Zheng, J., Yin, S., & Chen, G. (2025). Asymmetric and heterogeneous impacts of climate policy uncertainty on risk spillovers in China's traditional energy sector: A tail risk spillover network approach. *Sustainable Futures*, 10(October 2024), 100842. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100842>.
- Esmailpour Moghadam, H., & Karami, A. (2025). Recycling, natural resource rents, and climate policy uncertainty: Impacts on material sustainability in the U.S. *Energy Strategy Reviews*, 60(May), 101793. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.101793>.
- Gawusu, S., Abdul-fatawu, M., Solahudeen, M., Ackah, I., Waris, M., & Jasanya, O. (2025). Evaluating the impact of policy interventions on CO₂ emissions in Sub-Saharan Africa. *Sustainable Futures*, 10(March), 100936. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100936>.
- González Maestrey, R. A. (2022). Attempts To Repeal the Cuban Adjustment Act: a Public Policy Analysis. *International Journal of Cuban Studies*, 14(1), 13–35. <https://doi.org/10.13169/intejcubastud.14.1.0013>.
- Gooden, S. (2023). Social Equity in Public Administration: A Global Challenge. *Journal of Social Equity and Public Administration*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.24926/jsepa.v1i2.5096>.
- Guo, M., Li, H., & Lin, W. (2021). The impact of economic growth, FDI, and innovation on environmental efficiency of the logistics industry in provinces along the belt and road in China: An empirical study based on the panel Tobit model. *Science Progress*, 104(2), 1–24. <https://doi.org/10.1177/00368504211018054>.
- Henzie, J., Na, J., & Li, H. (2020). Impacts of China's national volume-based procurement policy on the pharmaceutical industry: A systematic review. *Nano Energy*, 105644. <https://doi.org/10.1016/j.pharp.2025.06.003>.
- Jahn, D., & Suda, S. (2022). Sustainable policy performance and types of governance: Is there a trade-off between consensus and efficiency? *European Policy Analysis*, 8(2), 209–230. <https://doi.org/10.1002/epa2.1143>.
- Jov, E., Trapero-bertran, M., & Trujillo-baute, E. (2025). *Energy poverty and health: does the social energy tariff help?* 206(May). <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114762>.
- Kirkley, M. (2025). *College of Health Sciences and Public Policy This*.
- Kliuchnyk, R. M. (2022). Наслідки Бідності Для Особистості Та Суспільства. *Європейський Вектор Економічного Розвитку*, 2(33), 50–61. <https://doi.org/10.32342/2074-5362-2022-2-33-4>.
- Laimon, M. (2025). *Energy Conversion and Management: X Empowering nations: Hydrogen solutions for eliminating energy dependence, emissions, and promoting sustainable income generation*. 27(January), 1–7.
- Lu, D., & Zeng Wenling, H. A. (2025). *The impact of pilot Low-carbon City Policies on urban Energy Ecological Efficiency*. 2025. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2025.03.047>
- Mahajan, S., & Helbing, D. (2025). *Revisiting Big Data Optimism: Risks of Data-Driven Black Box Algorithms for Revisiting Big Data Optimism: Risks of Data-Driven Black Box Algorithms for Society*. July. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18050.18887>
- Margaretta, F. (2025). *Anggaran DAU di Pamekasan Dipangkas Puluhan Miliar*. Radarmadura.Id. <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/745619643/anggaran->

- dau-di-pamekasan-dipangkas-puluhan-miliar?page=2.
- Nanda Sagita Ginting, M. F. (2025). *Imbas Efisiensi Anggaran*. KumparaNEWS. <https://jogja.tribunnews.com/2025/02/27/imb-efisiensi-anggaran-dana-insentif-desa-di-gunungkidul-ikut-terdampak>.
- Naufaldo, A. (2025). *Dana Desa Ditahan , Ini Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah*. Joglo Jateng. <https://joglojateng.com/2025/02/19/dana-desa-ditahan-ini-dampak-kebijakan-efisiensi-anggaran-pemerintah/>.
- Ndawo, G. (2021). Facilitation of emotional intelligence for the purpose of decision-making and problem-solving among nursing students in an authentic learning environment: A qualitative study. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 15, 100375. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2021.100375>.
- Ni'cholas Johnson. (2025). *ENGAGING MARGINALIZED RESIDENTS IN THE PLANNING, POLICY, AND LOCAL DECISION-MAKING PROCESSES: HBCU GRADUATES PERSPECTIVE*. March.
- Orhan, C. C., & Wallace, S. W. (2025). E-commerce shipments in an X-minute city: Informing authorities on freight transport through parcel lockers. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 199(June), 104545. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2025.104545>.
- Pahlevi, M. S., & Andriani, R. (2025). *Hybrid Philanthropy for SDGs : A Comparative Analysis of Funding Distribution Challenges in Remote Areas of*. 1(2), 91–111.
- Pattaro, S., Bailey, N., & Dibben, C. (2020). Using Linked Longitudinal Administrative Data to Identify Social Disadvantage. In *Social Indicators Research* (Vol. 147, Issue 3). <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02173-1>.
- Peiyan Yin , Y. Z. (2025). *The lasting impact of early-career financial crisis experiences on financial*. 151(July), 107196.
- Pristiandaru, D. L. (2025). *Pemangkasan Anggaran Pengaruhi Kesejahteraan Petani dan Ekonomi Desa*. Kompas.Com15 Juli 2025. <https://lestari.kompas.com/read/2025/02/18/110000886/pemangkasan-anggaran-pengaruh-kesejahteraan-petani-dan-ekonomi-desa>.
- Ramadhana, Y. E. (2025). *Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat , Kuota PTSL Blora Dipangkas*. Jawa Pos. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/715710346/terdampak-efisiensi-anggaran-pemerintah-pusat-kuota-ptsl-blora-dipangkas>.
- Raza, K., Zhang, Q., Irfan, M., & Pinzon, S. (2025). *Advancing SDG 7 & 13 in China : Investigating energy use , policy stringency , and environmental technologies for a low-carbon future*. 391(May), 518060.
- redaksi desa. (2025). *Efisiensi Anggaran , ADD Desa di Sinjai*. Desa Merdeka. <https://desamerdeka.id/efisiensi-anggaran-add-desa-di-sinjai-dipangkas-penyaluran-dd-terhambat/>.
- Réka Juhász, N. L. (2024). *No The Political Economy of Industrial Policy Title*. 38(Table 10), 4–6.
- Relius, N. (2025). *Efisiensi Anggaran , ADD Kepahiang Dipastikan Dipangkas Rp 3 , 4 Miliar*. Rbtv. <https://rbtv.disway.id/read/83058/efisiensi-anggaran-add-kepahiang-dipastikan-dipangkas-rp-34-miliar>.
- Saif, F. A., Yaseen, S. A., Alameen, A. S., Mane, S. B., Undre, P. B., Yaseen, S. A., & Alameen, A. S. (2020). Strengthening cancer care for the LGBTQIA+ population in Nepal: A narrative review to set priorities for equitable oncology services. *Social Science & Medicine*, 118377. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118377>.
- Shahi, R., & Chaudhary, B. P. (2025). Digital transformation : Adoption of information technology systems in higher education institutions of Nepal. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2524601>.

- Shikang Kang, Y. S. (2025). *How artificial intelligence drives industrial digitalization and greening synergies? Evidence from China's AI innovation and development pilot zones*. 2025.
- Sibanggor, R. (2025). *Efisiensi Anggaran Dana Pusat Akan Berdampak Bagi Pembangunan Madina*. Wahana News. <https://tapsel.wahananews.co/serba-serbi/efisiensi-anggaran-dana-pusat-akan-berdampak-bagi-pembangunan-madina-A8f9yjlEV4>.
- Steiker, C., & Jordan. (2019). Part Vi. *Comparative Capital Punishment*, 9(5), 300–300. <https://doi.org/10.4337/9781786433251.00026>.
- Sutikno, Karim, Z. A., & Idialis, A. R. (2025). Analysis of Village Fund Efficiency and the Variables Affecting It in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 14(2), 1–14. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(2\).2025.01](https://doi.org/10.21511/pmf.14(2).2025.01).
- Tao, W., Sachin, K. M., Weng, S., Deng, X., Chen, X.-L., & Song, M. (2025). Exploring the impact of energy saving and emission reduction fiscal policy on renewable energy development: Evidence from China. *Economic Analysis and Policy*, 87(October 2024), 463–483. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.06.018>.
- Teshome, M. B., Rasool, F., & Orzes, G. (2024). Mountain Logistics: A Systematic Literature Review and Future Research Directions. *Logistics*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/logistics8040115>.
- Timotius, T. (2025). *Dampak Efisiensi Anggaran , Dana Desa Kapuas Hulu*. Insidepontianak.Com. <https://insidepontianak.com/putussibau/35628/dampak-efisiensi-anggaran-dana-desa-kapuas-hulu-berkurang-rp34-miliar>.
- Vinturis, C. (2023). *Règles budgétaires et composition des dépenses To cite this version : Règles budgétaires et composition des dépenses publiques*.
- Wang, Y., Lu, Y., & Jiang, L. (2024). *The impact of stringent climate policy on macro-financial risks*. 2024.
- Wu, T., Zhang, H., Ji, M., & Zhang, R. (2024). Social inequality : practicing environmental , social and governance principle in China. *Environmental Impact Assessment Review*, 116(April 2025), 108069. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.108069>.
- Zhang, Y., Zhu, Y., Chen, Y., & Han, X. (2025). Policy impact on the global COVID-19 pandemic and unemployment outcomes: A large-scale mixed frequency spatial approach. *Economic Modelling*, 151(July 2024), 107160. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107160>.